

Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Abdul Rahman¹ Najamuddin² Wildhan Khalyubi³

¹²Universitas Negeri Makassar

³Universitas Indonesia

¹abdul.rahman8304@unm.ac.id

Abstract

The United Development Party (PPP) is one of the contestants in the general election since the new order era until the current Reformation era. In the course of politics in Indonesia, PPP as a party with Islamic nuances has never been the main winner in every election, even though the majority of Muslims in this country. This reaserch aims to reveal about the implementation of the 2019 general election and to elaborate on several events related to the United Development Party (PPP), so that it has an impact on the position of its vote acquisition in the 2019 general election. This study uses a historical qualitative research method. The data was obtained through a study of literature sharing in the form of books and journals. The results showed that PPP set a target to win 8% of the vote at the national level. To achieve this target, PPP has taken several strategies, including: visiting Islamic boarding schools, approaching the millennial generation, introducing new brands, and supporting the Joko Widodo and Ma'ruf Amin couple. However, PPP's hopes of gaining victory could not be realized because it faced several obstacles, namely: PPP's internal divisions, cracking at the ballot box, lack of public figures, and corruption cases. Some of these factors made PPP the party that took the last position in the vote that was declared to have passed as part of the members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Keywords: *United Development Party; Political; General Election*

Abstrak

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu kontestan pemilihan umum sejak era orde baru hingga era reformasi saat ini. Dalam perjalanan politik di Indonesia, PPP sebagai partai bernuansa Islam tidak pernah menempati pemenang utama di setiap pemilu, padahal umat Islam mayoritas di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang pelaksanaan pemilu 2019 dan mengelaborasi beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga berdampak terhadap posisi perolehan suaranya pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat historis. Pengumpulan data melalui kajian berbagai literatur kepustakaan berupa buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memasang target untuk memperoleh kemenangan 8% suara pada tingkat nasional. Untuk mencapai target tersebut, maka PPP menempuh beberapa strategi antara lain: melakukan kunjungan ke pondok pesantren, pendekatan terhadap generasi milenial, memperkenalkan brand baru, dan mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Akan tetapi harapan PPP untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diwujudkan karena menghadapi beberapa kendala yaitu: perpecahan internal PPP, pengembosan di lumbung suara, minimnya publik figur, dan kasus korupsi. Beberapa faktor tersebut menjadikan PPP sebagai partai yang menempati

posisi terakhir dalam perolehan suara yang dinyatakan lolos sebagai bagian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kata Kunci: Partai Persatuan Pembangunan; Politik; Pemilihan umum

Pendahuluan

Sistem demokrasi secara ideal menginginkan sebuah situasi di mana tata kelola pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keinginan yang demikian menjadikan kedaulatan rakyat sebagai episentrum dalam tata pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara (Chrisnandi, 2008). Indonesia yang menjunjung tinggi asas permusyawaratan dan permufakatan yang berlandaskan demokrasi Pancasila menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai perangkat demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif (Fatah, 2000). Sejak memasuki era reformasi, Indonesia sudah lima kali melaksanakan pemilu. Pemilu memberikan kesempatan kepada segenap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih perwakilan yang akan mengemban amanah di lembaga legislatif. Pada pemilu 2019 terdapat 16 partai politik sebagai kontestan, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik di Indonesia yang resmi didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam yaitu partai muslimin Indonesia, partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, partai Sarikat Islam Indonesia, dan partai Nahdlatul Ulama. Pendirian PPP dideklarasikan oleh K.H. Idham Chalid, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H, H. Anwar Tjokroaminoto, H. Rusli Halil, dan H. Masykur (Al Ghifari *et al.*, 2017). Pada awal pendirian PPP menggunakan asas Islam dan bersimbol *Ka'bah*. Namun dalam dinamika perpolitikan nasional, PPP menerapkan asas Pancasila sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintahan orde baru yang mewajibkan seluruh organisasi sosial kemasyarakatan maupun partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pada Muktamar I tahun 1984, PPP memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima yang merepresentasikan Pancasila dalam garis perjuangan PPP. Setelah orde baru runtuh yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Baharuddin Jusuf Habibie, PPP kembali menjadikan *Ka'bah* sebagai lambang partai dan Islam sebagai asas. Hal tersebut diputuskan dalam muktamar IV pada akhir tahun 1998 (Nurdin *et al.*, 2019). Adapun tujuan PPP sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar pasal 3 ialah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala (Baidowi, 2019).

Tujuan PPP yang dituangkan dalam anggaran dasar partai sangat relevan dengan doktrin Islam yang termaktub dalam al-Quran maupun *hadist nabi muhammad*. Islam mengajarkan untuk menghadirkan sistem sosial yang didalamnya terdapat sebuah kualitas tatanan kehidupan yang utuh dan komprehensif. Islam hadir untuk mewujudkan sistem kehidupan yang harmonis dalam berbagai dimensi, baik yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, Islam sebagai agama bukan hanya memberi panduan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ritual saja tetapi juga memberikan petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan sosial pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang populer dengan *al-islam din wa al-dawlah*, yang mengisyaratkan keterkaitan antara Islam dan negara (Muammar, 2020). Kehadiran PPP dalam panggung politik Indonesia bertujuan untuk

meyampaikan aspirasi politik Islam. Aspirasi politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif merupakan petunjuk etika dan budi pekerti mengenai kekuasaan. Bagi Islam, kekuasaan politik patut dimanfaatkan sebagai peralatan utama untuk mewujudkan cita-cita Islam di tanah tumpah darah Indonesia. Cita-cita tersebut antara lain adalah menegakkan keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan berkeadaban, yang berlandaskan tauhid (Maarif, 2018).

Penggunaan asas Islam oleh PPP tentu dimaksudkan untuk menaikkan elektabilitas partai dalam kancah perpolitikan nasional. Selain itu, pada awal reformasi identitas Islam mengalami penguatan dalam pentas politik nasional. Fenomena tersebut merupakan kontinuitas politik dalam satu dasawarsa terakhir masa orde baru yang memberi ruang untuk munculnya agenda Islam, dengan dinamika gerakan Islam pada awal reformasi. Dipahami secara umum bahwa telah terjadi perubahan kebijakan politik penguasa orde baru terhadap kelompok Islam sejak akhir tahun 1980-an. Pemerintahan Soeharto yang semula menunjukkan sikap antipati terhadap Islam dan kekuatan politik Islam, telah mengubah orientasi politiknya dengan mempopulerkan agenda-agenda Islam (Chalik, 2017). Menguatnya arus identitas Islam pada awal reformasi menjadikan PPP untuk memanfaatkan momentum tersebut dalam meraih simpati umat Islam dengan cara menjadikan Islam sebagai asas dalam menjalankan garis-garis perjuangan partai.

Harapan PPP untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari kalangan umat Islam didukung oleh sebuah kenyataan bahwa sejak zaman pergerakan nasional hingga memasuki reformasi, Islam telah tampil sebagai salah satu kekuatan politik yang mampu melakukan perubahan sistem sosial politik kenegaraan dan kemasyarakatan (Wahid, 2019). Reformasi yang ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi menjadikan PPP optimis bahwa umat Islam akan memberikan dukungan mayoritas terhadap PPP dalam kontestasi politik di tingkat nasional. Dengan segala kekuarangan dan kelemahan, PPP menganggap bahwa demokrasi di era reformasi memiliki prospek yang cerah dengan syarat para pelaku demokrasi harus bermuhasabah diri dan menghentikan segala perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para pelaku demokrasi harus menjaga diri dari perilaku politik uang, KKN, mempermainkan hukum dan saling menyalahkan satu sama lain. Demokrasi yang semakin bergerak diharapkan oleh PPP untuk semakin mantap dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu mencerahkan seluruh energi pikiran dan spiritualnya untuk pemulihan dan perbaikan bangsa secara komprehensif.

Kehadiran umat Islam sebagai kelompok terbanyak di negara Indonesia akan berpengaruh secara signifikan dalam percaturan politik. Akan tetapi dalam pandangan Zuly Qodir, umat Islam ketika tampil di ruang publik atau arena kontestasi politik harus dipandang secara bijak karena demikian beragam dan saling berkontestasi. Itulah konsekuensi beragama di dunia moderen yang sering dikatakan semakin sekuler sehingga agama hanya untuk pribadi, bukan untuk publik. Ada dua kosakata yang masyhur, publik dan privat dalam beragama menjadi hal yang senantiasa diperdebatkan sebagai bentuk kontestasi kaum beragama (Qodir, 2011). Agama memiliki dua posisi sekaligus yaitu sebagai urusan publik ketika umat Islam merasa memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik, dan pada sisi lain sebagai hamba Tuhan yang memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh yang diwujudkan dalam praktek ibadah ritual.

Slogan Islam *yes* partai Islam *no* yang pernah dipopulerkan oleh Nurcholis Madjid telah memunculkan kesadaran baru bagi umat Islam. Kesadaran umat Islam di Indonesia yang memisahkan antara urusan ibadah dan urusan publik menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik Islam (Munawar, 2019), termasuk PPP. Sejak pemilu dilaksanakan pada era reformasi, PPP tidak pernah tampil sebagai pemenang. Perolehan

suara PPP cenderung mengalami penurunan, bahkan pada pemilu 2019 PPP hanya mendapat 6.323.147 suara secara nasional. Fenomena ini patut untuk dianalisis sebab Islam sebagai kelompok terbanyak di negara Indonesia tetapi tidak memberikan dukungan mayoritas terhadap PPP sebagai partai berbasis Islam dan mengusung jargon bahwa PPP merupakan rumah besar umat Islam. Berbagai peristiwa yang terkait dengan PPP menjelang pemilu 2019 menarik pula untuk dicermati jika dikaitkan dengan jumlah suara yang diraihnya.

Metode

Penelitian ini ditulis dengan menerapkan metode riset kualitatif dan menghimpun data berdasarkan kajian literatur. Artikel ini berbentuk narasi sejarah, sehingga menggunakan pula pendekatan sejarah yang terdiri atas empat tahap. Adapun tahapan yang dimaksud meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik ialah pencarian data sejarah baik yang bersifat tertulis maupun lisan. Kritik ialah memberikan penilaian terhadap sumber sejarah tersebut. Interpretasi ialah upaya memberikan penafsiran terhadap sumber sejarah agar dapat diperoleh maknanya, sedangkan historiografi adalah proses penyajian riset sejarah secara tertulis. Terkait dengan penelitian ini, heuristik dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita harian dari berbagai media yang terkait dengan topik tulisan. Kritik dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap sumber-sumber pustaka tersebut dengan membandingkannya satu sama lain, kemudian diberikan penafsiran atau interpretasi sebagai upaya menghubungkan setiap peristiwa yang terkait dengan PPP dalam kontestasi pemilu 2019 dan diakhiri dengan rekonstruksi peristiwa dalam bentuk tertulis (historiografi) yang diharapkan dapat bernilai guna bagi usaha memajukan sains dan pengetahuan, terutama dalam disiplin sains sosial dan humaniora.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

Demokrasi merupakan wujud dari pluralisme budaya dan politik masyarakat. Sudah barang tentu, demokrasi memerlukan usaha-usaha konsolidasi secara mendasar. Guna melakukan konsolidasi dibutuhkan kemampuan para aktor demokrasi untuk mengelola keanekaragaman masyarakat supaya menjadi kekuatan demokrasi. Konsolidasi diperlukan sebagai upaya memperbanyak syarat yang diperlukan untuk membangun demokrasi. Salah satu persyaratan adalah kekuatan demokrasi dapat mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang berpotensi merusak kualitas tatanan demokrasi (Maliki, 2018). Kualitas demokrasi yang baik dibuktikan dengan hadirnya pendidikan politik terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Saleh & Rosyidi, 2018). Persyaratan untuk konsolidasi menuju demokrasi lebih rinci diuraikan oleh Mochtar Mas'ood terdiri dari sistem politik harus memiliki legitimasi wilayah, politik dan konstitusional, perlu kesepakatan bersama untuk mematuhi aturan main politik yang telah ditetapkan, pihak yang terpilih wajib mengajak kerjasama terhadap pihak yang tidak terpilih, meminimalisir kemiskinan yang terjadi di masyarakat, dan mampu meminimalisir perpecahan di masyarakat yang bernuansa etnik, budaya, dan agama (Harnawansyah, 2019). Dengan demikian, stabilitas sudah barang tentu merupakan salah satu syarat penting bagi kehidupan kebangsaan yang demokratis. Namun, stabilitas sejati memuat syarat agar kesadaran dan kemampuan pada tingkat nasional sejauh mungkin merupakan puncak dari upaya-upaya akal budi dan nurani serta kemampuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat umum.

Indonesia sejak zaman pergerakan nasional hingga terbentuknya sebagai negara merdeka dan berdaulat telah memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan sebuah negara

yang demokratis. Sebagai upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi maka diperlukan mekanisme, dan mekanisme yang disepakati dalam konteks negara Republik Indonesia adalah melalui pemilu. Menurut Ahmad Syafii Maarif, dalam arena politik (pemilu) yang menjanjikan pahala di pelupuk mata bagi yang berhasil, persaingan memang sering berlangsung ketat, keras, dan emosional. Semuanya ini masih bersifat manusiawi, asalkan tidak merusak, memfitnah, dan berlaku curang. Bentuk ideal akan terlaksana bila persaingan itu dapat berlangsung dalam format wacana, program, dan adu karakter yang mampu memperoleh simpati dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya (Maarif, 2019).

Sebagai upaya melaksanakan dan menyukseskan pemilu tahun 2019, pemerintah Republik Indonesia membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU terdiri atas 7 orang anggota diantaranya Arief Budiman, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Viryan. Adapun Bawaslu terdiri atas 5 orang anggota diantaranya Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edwar Siregar. Dalam melaksanakan pemilu 2019, KPU menetapkan beberapa tahapan yaitu:

- a. Verifikasi partai politik pada 1 oktober 2017
- b. Penetapan partai politik kontestan pemilu pada 1 maret 2018
- c. Pengusulan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD pada mei 2018
- d. Pengusulan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada agustus 2018
- e. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta daftar calon tetap DPR, DPD, dan DPRD pada september 2018.
- f. Pelaksanaan pemilu/pemungutan suara pada 17 april 2019
- g. Pengambilan sumpah anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi pada agustus sampai september 2019
- h. Aktivitas kampanye mulai 13 oktober 2018 sampai 13 april 2019
- i. Pengambilan sumpah anggota DPR dan DPD pada 1 oktober 2019
- j. Pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2019

Pada negara demokrasi, termasuk Indonesia, pemilu merupakan arena bagi masyarakat dalam melakukan penyegaran kepemimpinan nasional. Sejak era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, Indonesia telah melaksanakan 5 kali pemilu. Masih hangat dalam pikiran masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019. Dalam sejarah politik ketatanegaraan Indonesia pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang sangat kompleks. Betapa tidak, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan hak suara pada waktu yang bersamaan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota parlemen yang akan bertugas di DPR Pusat, DPRD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Pemilu tahun 2019 yang berlangsung pada tanggal 17 april 2019 diikuti oleh dua kontestan calon presiden dan wakil presiden yaitu Ir.H.Joko Widodo berpasangan dengan Prof. Dr (HC). K. H. Maaruf Amin, dan Letnan Jenderal (purnawirawan) H. Prabowo Subianto berpasangan dengan H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. Adapun partai politik yang berkontestasi pada arena pemilu 2019 diantaranya.

- a. Partai Kebangkitan Bangsa
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- d. Partai Golongan Karya
- e. Partai Nasional Demokrat
- f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- g. Partai Berkarya

- h. Partai Keadilan Sejahtera
- i. Partai Persatuan Indonesia
- j. Partai Persatuan Pembangunan
- k. Partai Solidaritas Indonesia
- l. Partai Amanat Nasional
- m. Partai Hati Nurani Rakyat
- n. Partai Demokrat
- o. Partai Bulan Bintang
- p. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Melihat partai peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka fenomena kelompok nasionalis dan kelompok Islam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia sebagai upaya dalam menebar kebaikan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Elit-elit partai peserta pemilu 2019 telah bersepakat untuk menciptakan proses demokratisasi di Indonesia dengan cara harmonis dan saling menghormati sesama peserta pemilu. Dalam berbagai kesempatan para petinggi partai menyampaikan kepada khalayak Indonesia bahwa bukan saatnya lagi untuk mendikotomikan antara Islam dan nasionalis, sebab persoalan tersebut telah diselesaikan oleh pendiri bangsa ini di awal kemerdekaan yang ditandai dengan kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pemilu 2019 diwarnai dengan persaingan partai politik untuk merebut suara dari kalangan masyarakat Islam. Kondisi ini merupakan hal wajar dan realistis dalam kalkulasi politik untuk memperoleh kemenangan karena Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh *the pew forum on religion and public life*, jumlah warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam sejumlah 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari keseluruhan jumlah penduduk (Salamia, 2019). Menurut Azyumardi Azra, faktor demografi tersebut, kaum muslimin di Indonesia menjadi faktor utama dalam konsolidasi demokrasi. Tanpa dukungan, demokrasi dan perjuangan politik tak akan membuahkan hasil yang maksimal (Azra, 2016) dalam mewujudkan kekuasaan berdasarkan ajaran-ajaran luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Umat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas menjadi harapan partai politik termasuk PPP dalam memperoleh dukungan politik pada setiap pemilu. Sejak KPU telah menetapkan partai peserta pemilu 2019 dan disusul dengan pelaksanaan kampanye, maka PPP menargetkan tetap lolos pada ambang batas 4 persen, bahkan berharap mendapatkan 8 persen suara tingkat nasional. Rasa optimis tersebut didukung oleh kenyataan bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, calon yang diusung oleh PPP di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memperoleh kemenangan yang gemilang. Ketika pelaksanaan pemilihan umum 2019, PPP tetap konsisten mempertahankan ideologi partai yang menjadikan Islam sebagai basis dan senantiasa berjuang untuk kepentingan umat Islam. PPP tetap akan berjuang dalam rangka memberikan pendidikan dan pencerahan kepada umat Islam dalam bingkai *rahmatan lil alamin* dan tidak akan terjebak untuk mengakomodasi kepentingan di luar umat Islam dalam porsi yang besar demi memperoleh popularitas. Keteguhan sikap PPP tersebut merupakan hal yang wajar karena umat Islam memang mayoritas, akan tetapi bagi PPP umat Islam masih dalam kondisi ketertinggalan pada aspek kesejahteraan dan pendidikan.

Perjuangan PPP tetap berada pada keterkaitan antara agama dan politik. Hal tersebut berangkat dari realitas bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih konsisten menempatkan agama sebagai pusat kehidupan. PPP tidak bisa mengelak bahwa kehidupan masyarakat di negara ini sangat bernuansa religius. Implikasi nyata dalam percaturan politik adalah bahwa dalam realitas tertentu harus ada pengakuan politik

terhadap agama, dalam arti kepentingan agama dalam kondisi tertentu harus diperjuangkan dalam arena perpolitikan kebangsaan, sehingga pemisahan antara agama dan politik bagi PPP merupakan hal yang mustahil. Pemisahan antara agama dan politik bagi PPP merupakan bentuk penghianatan terhadap umat, khususnya umat Islam, dan pada sisi lain merupakan tindakan yang ceroboh karena dapat menyebabkan umat Islam menarik dukungan politiknya. Sudah menjadi kenyataan sejarah bahwa, perpolitikan di Indonesia tidak akan jalan jika tidak didukung oleh agama, khususnya dari kalangan umat Islam, sebab Segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara ini senantiasa memerlukan legitimasi dan justifikasi dari ajaran agama.

Salah satu upaya bagi PPP dalam meraih cita-cita dan tujuan politik, yakni kokohnya sebuah sistem yang mengacu pada nilai-nilai agama Islam. PPP dalam melakukan perjuangan politik senantiasa mengedepankan politik yang bermartabat dan memberikan penekanan pada penanaman etika dan moral agama ke dalam diri pribadi dengan harapan agar terwujud kedewasaan dan kesadaran warga masyarakat dalam hidup bernegara, sehingga warga negara mampu menatakelola diri pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika harapan itu terwujud, bukan berarti PPP menafikkan keberadaan negara, tetapi justru PPP merupakan pilar penting dalam menjaga keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat.

Posisi PPP yang tetap konsisten mempertahankan antara agama dan politik senada dengan uraian tentang sebab munculnya partai agama yang dijelaskan oleh TH. Sumartana yaitu: pertama, agama itu sendiri mempunyai ajaran-ajaran yang berdimensi ketuhanan untuk meraih keinginan dan harapan yang bersumber dari doktrin keagamaan yang diyakini. Kedua, kesamaan pandangan dan cita-cita politik yang berasal dari penganutnya menjadikan agama menjadi unsur pemersatu dalam menyokong pimpinan dari internal agama yang bersangkutan. Ketiga, penganut agama tertentu meyakini akan terwujudnya keharmonisan sosial jika pemimpin politik memiliki kesamaan asal-usul terutama dari kelompoknya sendiri, dan merasa khawatir jika kekuasaan politik didominasi oleh kelompok yang berasal dari luar agama yang dianutnya (Sumartana, 1999). Akan tetapi pada point ketiga, posisi PPP tidak berkesesuaian sebab pada beberapa wilayah di Indonesia saat melaksanakan pilkada baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, PPP memberikan dukungan terhadap pasangan calon yang berasal dari kalangan di luar agama Islam.

Keinginan PPP untuk memperoleh suara 8 persen pada tingkat nasional tentu harus dibarengi dengan strategi yang mumpuni. Strategi dalam pandangan Prihatmoko dan Moesafa adalah segala rencana dan aksi yang dilaksanakan dalam meraih tujuan. Strategi terkait dengan berbagai aktivitas, dalam hal ini berupaya untuk melakukan analisa terhadap kekuatan pendukung dan jumlah suara yang dapat diperoleh, serta terkait dengan cara yang diterapkan untuk meraih simpati dan dukungan rakyat sebagai pemilik suara (Pesak *et al.*, 2021). Lebih lanjut Schroder menerangkan bahwa strategi perjuangan politik merupakan strategi yang dipergunakan untuk mencapai cita-cita dan harapan di bidang politik (Putriwani, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa jurnal maupun pemberitaan media massa yang bersifat *online* dan *offline*, maka ditemukan beberapa strategi yang ditempuh oleh PPP antara lain:

a. Melakukan Kunjungan ke Pondok Pesantren

Demokrasi secara konseptual dimaknai sebagai tatanan kekuasaan yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, maka sangat diperlukan perjuangan dari para pengemban amanah rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kualitas para anggota legislatif sangat bergantung pada pilihan rakyat melalui mekanisme pemilu untuk memilih pimpinan dan menentukan kebijakan untuk

mewujudkan harapannya (Hasibuan, 2020). Berkaitan dengan perwujudan negara demokratis, maka semua pihak terutama masyarakat di tingkat akar rumput menghendaki kualitas tatanan berupa kokohnya seperangkat sistem kenegaraan yang peranannya digerakkan oleh sistem kebijakan politik untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan, yakni kehidupan rakyat yang sejahtera. Kokohnya sebuah sistem penyelenggaraan negara yang demokratis harus ditopang oleh pemimpin yang memiliki kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi. Pemimpin tersebut diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Atas dasar itu, adalah hal yang lazim ketika para calon pemimpin secara umum menebarkan harapan berupa rencana-rencana di hadapan rakyat. Menurut Achmad Jainuri, penawaran rencana itu dilaksanakan dengan menjalin komunikasi dengan pusat-pusat kekuasaan di lingkungan masyarakat, misalnya kyai pondok pesantren (Qodir *et al.*, 2015).

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam merupakan fakta yang tak dapat dinafikan. Berdasarkan pada perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, pesantren terus menekuni pendidikan yang bercorak Islam dan menjadikannya sebagai fokus kegiatan. Dalam pengembangan pendidikan, pesantren telah menunjukkan daya tahan yang cukup tangguh sehingga mampu menghadapi aneka ragam tantangan zaman dengan berbagai masalah yang mengikutinya. Realitas sejarah menunjukkan bahawa pesantren telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan dan kemajuan Islam di negara ini, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan umat (Trisnani, 2021). Eksistensi pesantren di Indonesia selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, juga merupakan entitas sosial yang mempunyai daya tawar sangat kuat dalam bidang politik.

Upaya PPP untuk meraih dukungan politik dari kyai dan pondok pesantren merupakan bentuk tindakan sosial yang rasional instrumental. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan rasional instrumental merupakan harapan atau tingkah laku individu atau aktor terhadap lingkungan maupun orang lain dalam rangka memperoleh tujuan-tujuan yang telah direncanakan oleh aktor dengan penuh pertimbangan rasional (Herdiansah, 2017). Untuk meraih dukungan politik, keberadaan pondok pesantren sangat diperhitungkan, terutama pondok pesantren tradisional. Pada lingkungan pondok pesantren tradisional, kyai memiliki peranan yang sangat besar dan merupakan titik sentral dalam interaksi sosial. Dalam pandangan Zamaksyari Dhofier, pesantren dapat diibartkan sebagai sebuah kerajaan kecil yang menempatkan kyai sebagai sumber mutlak dari kewenangan dan kekuasaan dalam lingkungan pondok pesantren (Nursyamsiyah, 2018). Kyai merupakan figur sentral yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak mempengaruhi pola kehidupan santri (Madani & Marijan, 2021). Dalam tradisi pesantren, kyai memiliki kedudukan yang istimewa dan nasihatnya dipatuhi karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman yang sangat mendalam (Sanusi & Gumilar, 2019). Dengan demikian, jika kyai telah memberikan dukungan politik kepada salah satu partai, maka diduga kuat para santri akan mengikut pada pilihan politik kyai. Hal ini diperkuat oleh Zinuddin Syarif bahwa ikatan moral yang terjalin antara kyai dengan santri juga mengarah pada kepatuhan dalam urusan politik. Santri aktif senantiasa berpatokan pada pilihan politik kyai yang membinanya (Miskan, 2018). Untuk meraih dukungan dari kalangan pondok pesantren, PPP sangat gencar melakukan sosialisasi dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Pesantren (RUU Pesantren) agar segera disahkan oleh DPR. Sebab, jika RUU pesantren telah disahkan, maka keberadaan pesantren akan semakin diakui keberadaannya oleh negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan akhlak terhadap generasi muda umat Islam agar dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan menciptakan kemaslahatan umat. Selain itu, dalam RUU tersebut diatur mengenai adanya 5 pos

anggaran untuk pesantren yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pendidikan pesantren yaitu APBN, APBD, bantuan kerjasama dengan negara lain, bantuan kerjasama dengan masyarakat umum misalnya perusahaan, dan dana abadi umat/pesantren.

b. Pendekatan Terhadap Generasi Milenial

Sejak pemilu dilaksanakan di Republik Indonesia, barulah pemilu 2019 yang membuat partai politik mencurahkan perhatian kepada generasi muda yang lebih populer disebut dengan kaum milenial. Kelompok kaum milenial memiliki posisi yang penting dalam menentukan keberlangsungan pemilu 2019, sebab memiliki populasi sekitar 40% yang berstatus sebagai pemilih (Tarsidi *et al.*, 2019). Partai politik yang memiliki kemampuan untuk berpikir, menampung dan menjalankan keinginan dan harapan kelompok milenial akan memiliki kesempatan dalam memenangkan pemilu. Akan tetapi, meraih simpati bukan pekerjaan yang mudah. Kaum milenial adalah kelompok yang sulit didikte dalam hal pilihan politik, kaum milenial merupakan pemilih yang rasional dan menyukai figur yang cerdas juga.

Berdasarkan temuan dari Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, kaum milenial memiliki 3 karakter diantaranya pertama, kaum milenial merupakan generasi yang memiliki gagasan-gagasan kreatif. Kaum milenial cenderung berpikir tajam, kritis dan kreatif dalam memandang permasalahan. Kaum milenial lebih cenderung menghadirkan gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan segala persoalan. Kedua, kaum milenial memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga selalu terbuka kepada siapa pun dan kapan pun untuk berdialog dalam membahas persoalan, sekalipun itu di ruang publik. Ketiga, kaum milenial merupakan kelompok yang suka membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai komunitas dan memiliki kemampuan tinggi untuk memanfaatkan ruang-ruang sosial/media sosial (Ali & Purwandi, 2016).

Kaum milenial di Indonesia memiliki optimisme yang tinggi. Kaum milenial saat ini memiliki kesiapan dalam menyongsong sekaligus menghadapi perkembangan global yang semakin kompleks. Kaum milenial berani memberi kepastian dan jaminan bahwa kehidupan di masa yang akan datang jauh lebih mapan secara sosial ekonomis dibandingkan dengan generasi muda 20 tahun silam. Kaum milenial merasa optimis mempunyai kesempatan lebih luas dalam memperoleh pendidikan bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi modal utama untuk terlibat dalam dunia kerja kemudian mendapat penghasilan yang lebih besar, menikmati kemudahan memperoleh hal-hal produktif dalam kehidupan serta memiliki andil dalam mendorong perubahan sosial (Azra, 2020).

Melihat karakter tersebut, maka PPP melalui Romahurmuzyi mengimbau kepada segenap kader untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan selera dan kebutuhan kaum milenial misalnya dengan mengadakan *try out*, festival band dan acara-acara sejenisnya. Selain itu, kader dan para calon anggota legislatif juga aktif di jagad media sosial misalnya facebook, instagram, twitter, dan youtube. Himbauan tersebut berangkat dari realitas bahwa dalam era perpolitikan kontemporer media sosial sangat efektif dalam kegiatan kampanye (Ruhany, 2019), sebab kaum milenial sangat aktif di media sosial dalam menyampaikan aspirasi ataupun menyerap informasi, termasuk yang berkaitan dengan dinamika perpolitikan nasional menjelang pemilu 2019. Hal ini diperkuat oleh temuan Nur Ainiyah bahwa dengan kehadiran media sosial, maka yang paling banyak memanfaatkannya adalah kaum milenial untuk menjalin pertemanan atau komunikasi dengan orang lain yang melintasi batas-batas negara (Ainiyah, 2018). Hal tersebut diperkuat pula oleh temuan Lucy Pujasari Supratman bahwa kaum milenial lebih dominan memanfaatkan media sosial dalam berkomunikasi secara virtual serta berbagi informasi (Supratman, 2018).

c. Memperkenalkan *Brand* Baru

Dalam perspektif ilmu komunikasi, merek atau *brand* merupakan salah satu unsur yang selalu terkait dengan pengembangan dan tata kelola organisasi, termasuk partai politik. Kehadiran *brand* dalam partai politik merupakan suatu hal yang lumrah demi mendekatkan diri kepada masyarakat sebagaimana dipahami bahwa partai politik itu lahir sebagai respon terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya, konsep *brand* pada awalnya hanya familiar di kalangan ilmuwan yang menggeluti manajemen pemasaran dan komunikasi. Dalam perspektif pemasaran dan komunikasi *brand* diartikan sebagai janji yang disampaikan kepada konsumen agar dapat menaruh harapan besar atas janji yang terungkap melalui komunikasi merek (Rachmadi & Budianto, 2020).

Branding merupakan bagian dari marketing politik (Fatayati, 2016). Menurut Adman Nursal, marketing politik dimaknai sebagai strategi politik dalam rangka membentuk sejumlah makna politisi tertentu dalam pemikiran di kalangan pemilih (Nasution, 2019). Untuk menarik simpati pemilih yang lebih banyak, maka PPP memperkenalkan *brand* baru yaitu bergerak bersama rakyat yang diputuskan pada rapat kerja PPP pada tanggal 3-5 Juni 2016, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Brand lama rumah besar umat Islam sudah dinggap mengakar di kalangan pemilih fanatik PPP sejak pelaksanaan pemilu di era orde baru. Perubahan *brand* dimaksudkan untuk meraih suara dari kalangan milenial yang dianggap tidak terlalu populer dengan isu-isu keagamaan. Seiring dengan perubahan *brand* dari rumah besar umat Islam ke bergerak bersama rakyat diikuti pula dengan konsep trilogi kemenangan pemilu PPP. Hal itu berlandaskan pada kaidah tradisi pesantren yaitu mempertahankan kebiasaan lama yang memiliki sisi baik dan mengambil perilaku baru yang lebih baik. Aplikasi kaidah tersebut menyatakan bahwa pertama, PPP berusaha untuk mempertahankan pemilih yang telah mendukung hingga dapat menembus parlemen pada tahun 2014. Kedua, mempertahankan pemilih pada pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang telah mengantarkan PPP ke parlemen. Ketiga, meraih dukungan dari pemilih pemula yang selama ini belum familiar dengan PPP.

Trilogi kemenangan pemilu PPP dimaksudkan untuk mempertahankan pemilih dari kalangan pemilih senior dan meraih simpati dari pemilih pemula. Untuk maksud tersebut maka PPP memberikan harapan bahwa jika mampu memperoleh posisi tiga besar di DPR-RI maka akan memperjuangkan 10 program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Peningkatan dana untuk program keluarga harapan menjadi Rp 3.780.000 setiap rumah tangga dalam satu tahun.
- 2) Peningkatan jumlah penerima program keluarga harapan menjadi 28 juta kepala keluarga
- 3) Peningkatan pinjaman tanpa jaminan bagi peserta program membina ekonomi keluarga sejahtera menjadi Rp.5.000.000.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana pertanian bagi setiap kelompok tani.
- 5) Memberikan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan.
- 6) Peningkatan dana desa bagi setiap desa sejumlah 1,4 miliar rupiah.
- 7) Melakukan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera.
- 8) Pemberian tunjangan bagi guru honorer sejumlah Rp.1.000.000 per bulan.
- 9) Pengadaan satu hafiz setiap desa melalui program tahfiz.
- 10) Menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis bagi sesama muslim, sesama warga negara Indonesia dan sesama manusia.

d. Mendukung Pasangan Jokowi-Maruf

Pada pemilu 2019 yang lalu, terdapat dua kontestan calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Joko Widodo yang berpasangan dengan M. Ma'ruf Amin yang mendapat dukungan dari PDI-P, PKB, Golongan Karya, Nasional Demokrat, PPP, PSI, PKPI, PBB, Hanura, dan Perindo. Sementara Prabowo Subianto yang berpasangan Sandiaga Salahuddin Uno diberi dukungan oleh Gerakan Indonesia Raya, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Dukungan PPP terhadap Joko Widodo-M.Ma'ruf Amin disepakati dalam musyawarah kerja nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 juli 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara. Keputusan tersebut didasarkan pada keberhasilan Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya dalam membangun Indonesia, terutama dalam pembangunan fisik infrastruktur. Selain itu Joko Widodo merupakan sosok sederhana yang dekat dengan rakyat dan tidak melibatkan keluarganya dalam kegiatan politik maupun bisnis yang bersentuhan dengan lembaga pemerintahan Republik Indonesia.

Dukungan PPP terhadap Joko Widodo - M. Ma'ruf Amin merupakan sebuah strategi untuk meraih simpati dan dukungan pemilih. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas PPP dalam kontestasi pemilu 2019. Menurut Nur Rohim Yunus, dukungan partai terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu akan meningkatkan elektabilitas partai tersebut yang lazim disebut efek ekor jas (Yunus, 2018). Efek ekor jas pernah terbukti pada pemilu 2004 yang menghantarkan Partai Demokrat memperoleh suara yang signifikan bahkan tampil sebagai pemenang pemilu pada tahun 2009 karena pengaruh figur Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang sama diharapkan oleh PPP pada pemilu 2019 yang menampilkan Jokowi sebagai figur yang dekat dengan PPP.

2. Posisi PPP Dalam Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil keseluruhan penghitungan suara hasil pemungutan suara pada tanggal 21 mei 2019. Hasil pemilu tersebut kemudian dituangkan dan disahkan dalam keputusan nomor 135/PL/KPU/V/2019 (Noviyati & Yasin, 2021). Keputusan tersebut memuat tentang penetapan jumlah suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU, jumlah suara sah di tingkat nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sejumlah 154.257.601 suara. Joko Widodo yang berpasangan dengan M. Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang dan meraih total jumlah suara sah sebanyak 85.607.362 suara, sementara Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno meraih total suara sah sebanyak 68.650.239 suara (Kurnia & Sudarwadi, 2020). Selain KPU merilis hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, juga dirilis hasil perolehan suara partai politik pada ajang pemilu 2019. Berdasarkan data yang dihimpun dari liputan 6.com (Wicaksono & Aziz, 2020), perolehan suara partai politik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perolehan suara partai politik pemilu 2019

Partai	Perolehan Suara	Persentase
PDI-P	27.053.961	19,33
Gerindra	17.594.839	12,57
Golkar	17.229.789	12,31
PKB	13.570.097	9,69
Nasdem	12.661.792	9,05
PKS	11.493.663	8,21

Demokrat	10.876.507	7,77
PAN	9.572.623	6,84
PPP	6.323.147	4,52
Perindo	3.738.320	2,67
Berkarya	2.929.495	2,09
PSI	2.650.361	1,89
Hanura	1.161.507	1,54
PBB	1.099.848	0,79
Garuda	702.536	0,50
PKPI	312.705	0,22

(Sumber: Wicaksono dan Aziz, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, PPP menempati posisi terakhir dari 9 partai yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen, jauh dari harapan yang menargetkan posisi 3 besar dalam parlemen. Perolehan suara PPP memiliki kesamaan dengan perolehan data survey yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas (22 februari - 5 maret 2019), Charta Politika (1-9 maret 2019), dan Vox Populi (5-15 maret 2019). Hasil survey dari tiga lembaga tersebut menempatkan elektabilitas PPP tidak masuk dalam 5 besar (Nurdin *et al.*, 2019). Kegagalan PPP mencapai posisi 3 besar pada pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Perpecahan Internal PPP

Jejak perpecahan dalam lingkungan internal PPP dapat ditelusuri sejak pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pada masa itu, Suryadharma Ali sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PPP melakukan manuver politik dengan cara menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra pada tanggal 23 maret 2014. Sontak saja, manuver tersebut mendapatkan protes dari 27 dewan pimpinan wilayah PPP di Indonesia, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan dilaksanakannya musyawarah kerja nasional III PPP di Bogor.

Kekisruhan dalam lingkungan PPP mencapai puncaknya ketika Suryadarma Ali dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan dana operasional menteri. Kalangan internal PPP menghendaki agar Suryadarma Ali mengundurkan diri dari jabatan ketua umum demi menjaga nama baik partai, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Suryadarma Ali. Atas dasar tersebut, maka Romahurmuziy selaku sekretaris jenderal PPP mengambil tindakan antisipatif dengan memecat Suryadarma Ali dari jabatan ketua umum dan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan muktamar di Surabaya. Hasil muktamar tersebut menetapkan Romahurmuziy selaku ketua umum PPP terhitung sejak 16 oktober 2014. Akan tetapi, hasil muktamar Surabaya tidak diakui oleh sebagian pengurus PPP yang masih loyal terhadap Suryadarma Ali. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya muktamar pada tanggal 30 oktober sampai 2 november 2014 di Jakarta, yang menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum. Kedua muktamar tersebut masing-masing mengaku diri sebagai pengurus PPP yang sah, akan tetapi Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kepemimpinan Romahurmuziy sebagai DPP PPP yang sah.

Konflik internal yang melanda PPP pada akhirnya memunculkan kekecewaan. Kekecewaan tersebut terwujud dengan adanya sejumlah tokoh-tokoh PPP yang memilih untuk pindah ke partai lain. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: Abraham Lunggana pindah ke PAN, Ahmad Yani pindah ke PBB, Okky Asokawati pindah ke Partai Nasdem, dan Ahmad Dimiyati Natakusumah pindah ke PKS. Perpindahan tokoh-tokoh tersebut tentu berpengaruh pada perolehan suara PPP, sebab memiliki massa dan pendukung fanatik di masyarakat akar rumput.

b. Penggembosan di Lumbung Suara PPP

Klaim PPP atas provinsi yang mayoritas masyarakatnya terkenal sebagai masyarakat yang religius islamis yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebagai lumbung suara ternyata berbeda dengan kenyataan hasil pemilu 2019. Di Provinsi Jawa Barat PPP hanya memperoleh sejumlah 1.111.362 suara, di Provinsi Banten sejumlah 313.012 suara, dan di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 175.935 suara (Husin *et al.*, 2021). Perolehan suara PPP sebagai partai Islam di provinsi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sangat minim dibandingkan dengan partai yang berhaluan nasionalis. Kekalahan PPP di tiga provinsi tersebut merupakan bukti pengadilan rakyat atas ketidaksukaan terhadap perilaku korupsi yang melibatkan kader-kader partai Islam (Thalib, 2019). Sebagai provinsi yang masyarakatnya sangat identik dengan penganut Islam yang taat, tentu memunculkan kekecewaan terhadap PPP yang berada dalam barisan pendukung Joko Widodo yang berpasangan dengan M.Ma'ruf Amin.

Secara umum diakui bahwa pada ketiga provinsi tersebut, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno unggul di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan kalah tipis di Provinsi DKI Jakarta. Jika melihat peristiwa gerakan anti penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), kebanyakan massa pendukung gerakan tersebut berasal dari tiga provinsi yang selama ini menjadi lumbung suara PPP. Dengan bergabungnya PPP dalam barisan pendukung Joko Widodo dan M. Ma'ruf Amin, yang dianggap merupakan barisan utama yang pernah mendukung Ahok di pilkada DKI, maka massa pendukung PPP pada pemilu sebelumnya mengalihkan pilihan kepada partai yang bernuansa Islam misalnya PAN dan PKS sebagai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam pemilu 2019.

c. Minimnya Publik Figur

Keberadaan partai politik di negara-negara demokratis termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kehadiran seorang figur. Keberadaan figur dalam salah satu partai dapat meningkatkan citra partai di kalangan masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan oleh PDI-P yang tidak dapat dipisahkan dengan figur Megawati Soekarno Putri, PKB yang selalu dikaitkan dengan Abdurrahman Wahid, dan Partai Gerindra yang identik dengan Prabowo Subianto. Berbeda dengan kondisi PPP sulit menemukan figur sentral yang dapat meningkatkan citra partai di hadapan publik.

Dalam menjalin komunikasi politik dengan masyarakat melalui media massa, PPP mengalami kesulitan akan hal tersebut. Padahal, harus diakui bahwa kehadiran seorang figur di media televisi dalam menyampaikan ide dan gagasan melalui iklan, debat ataupun *talkshow* yang terkait dengan program partai memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memilih oleh pemilih yang tidak aktif di media sosial (A. B. Subhan, 2017). Ketika ada dialog atau debat yang ditayangkan oleh televisi, sosok yang selalu ditampilkan oleh PPP hanya Romahurmuziy dan Arsul Sani. Berbeda dengan partai-partai yang lain, memiliki figur-figur yang familiar di kalangan pemilih misalnya Budiman Sudjatmiko, Arya Bima, Adian Yusac Napitupulu, Ahmad Basarah (PDI-P), Ahmad Riza Patria, Fadli Zon, Andre Rosiade, Ahmad Muzani (Gerindra), Muhaimin Iskandar, Abdul Kadir Karding, Ida Fauziah, Abdul Malik Haramain (PKB).

d. Kasus korupsi

Lembaga khusus yang menangani kejahatan korupsi di Indonesi, yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadikan Romahurmuziy, ketua umum PPP sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 16 Maret 2019. Romahurmuziy dinyatakan terkait dengan sengkabut di lingkungan Kementerian Agama, khususnya dalam hal jual beli jabatan setelah KPK mengadakan operasi tangkap tangan terhadap Romahurmuziy di Surabaya pada tanggal 15 maret 2019. Penangkapan terhadap Romahurmuziy dinilai

oleh para pengamat politik akan membuat PPP kewalahan dalam mencapai ambang batas parlemen yang telah ditetapkan oleh KPU.

Keterlibatan Romahurmuziy dalam kasus korupsi memunculkan kekecewaan terhadap PPP yang selama ini dikenal sebagai partai yang berasaskan Islam. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan hengkangnya beberapa pemilih di berbagai provinsi yang pada pemilu sebelumnya (1999, 2004, 2009, 2014) sebagai lumbung suara PPP. Dipahami secara umum bahwa masyarakat sangat tidak menyukai tindakan korupsi karena merugikan negara yang sedang berjuang untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu tindakan korupsi dinilai sangat tidak berkesesuaian dengan ajaran-ajaran luhur yang termaktub pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman bernegara di Republik Indonesia. Ketidaksukaan masyarakat terhadap tindakan korupsi dibuktikan oleh hasil *survey* Indonesia *corruption watch* dan *polling center* yang dirilis pada tanggal 20 Juli 2017. Hasil *survey* tersebut menyatakan bahwa partai politik, perusahaan swasta, dan Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan tingkat kepercayaan rakyat paling rendah karena perilaku anggota yang sering terlibat dalam kasus korupsi (Ardianto, 2019). Penarikan dukungan masyarakat terhadap partai yang tokoh-tokohnya terlibat dalam kasus korupsi pernah dialami oleh Partai Demokrat. Pada pemilu tahun 2009 Partai Demokrat merupakan pemenang pemilu yang memperoleh sejumlah 21.655.295 suara (20,81%), namun tiba-tiba anjlok pada pemilu 2014 dengan perolehan suara 12.724.509 suara (10,19%) (Aminuddin & Ramadhan, 2015).

Upaya PPP untuk meraih simpati dan dukungan dari pemilih kaum milenial mengalami kegagalan karena perilaku korupsi yang melibatkan ketua umum. Dipahami bahwa kaum milenial memiliki pemikiran ideal dan kritis, sehingga segala yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, terutama perilaku korupsi dan sikap intoleransi merupakan hal yang sangat dibencinya. Partai Solidaritas Indonesia yang mencitrakan diri sebagai partai milenial dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan generasi muda untuk memelihara NKRI dengan menjauhi sikap intoleransi dan perilaku korupsi. Demikian halnya di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari kaum milenial dalam berbagai aksi-aksi di jalanan selalu meneriakkan slogan antikorupsi dan mengecam perilaku elit partai yang tersandung kasus korupsi.

Kesimpulan

Melihat kenyataan bahwa posisi PPP dalam kontestasi pemilu 2019 yang menempati urutan terakhir dari 9 partai yang dinyatakan lolos dalam ambang batas parlemen, maka dapat dikatakan bahwa PPP tengah terjebak dalam pergulatan sistem demokrasi dan Islam. PPP pada satu sisi ingin tampil sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan umat Islam, tetapi pada sisi lain sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada segenap masyarakat, termasuk dari kalangan Islam untuk bebas dalam menyampaikan aspirasinya dalam arena pemilu. Menurunnya dukungan masyarakat Islam terhadap PPP sebagai partai Islam merupakan bukti nyata bahwa pendidikan demokrasi berhasil ditanamkan di lingkungan masyarakat. Masyarakat tidak lagi terjebak dan tergoda dengan janji-janji partai formalisme Islam, sebab partai yang bersifat nasionalis juga mampu menghadirkan janji-janji yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Islam Indonesia telah memunculkan karakternya sendiri dalam percaturan politik, yakni lebih mementingkan substansi daripada jargon. Bagi masyarakat Islam Indonesia, adalah suatu hal yang kontraproduktif ketika sebuah partai mencitrakan diri sebagai partai Islam yang hendak berjuang untuk kemakmuran umat dan bangsa, tetapi perilaku elit partai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya korupsi dan intoleransi.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236.
- Al Ghifari, M. A. D., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2017). Penyelesaian konflik kepengurusan partai persatuan pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Ali, H., & Purwandi, L. (2016). *Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennials*. Alvara Research Center
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 39–74.
- Ardianto, H. T. (2019). Uang dan Partai Politik: Urgensi Mengatur Keuangan Parpol dan Kandidat Dalam Kompetisi Elektoral. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–16.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Kencana.
- Azra, A. (2020). *Gerakan Pembebasan Islam*. Kencana.
- Baidowi, A. (2019). *Musibah Partai Kakbah: Potret Perjalanan PPP 2014-2019*. Samudra Biru.
- Chalik, A. (2017). *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chrisnandi, Y. (2008). *Beyond Parlemen: Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*. Ind Hill Co.
- Fatah, E. S. (2000). *Zama Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Mizan.
- Fatayati, S. (2016). Branding Politik Joko Widodo dalam Pilpres 2014 di Media Online. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 25–39.
- Harnawansyah, M. F. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Jawa Timur: Scopindo Media Pustaka.
- Hasibuan, A. K. (2020). Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 260–276.
- Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 152–167.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57–78.
- Kurnia, D. A., & Sudarwadi, D. (2020). Dampak Pengumuman Hasil Pemilu Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Terhadap Saham Indeks Idx30. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 96–102.
- Maarif, A. S. (2018). *Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Maarif, A. S. (2019). *Menerobos Kemelut: Catatan-Catatan Kritis Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: Ircisod.

- Madani, C. Y., & Marijan, K. (2021). Pengaruh Kiai Terhadap Perilaku Memilih Alumni Santri Pondok Pesantren Mbi Amanatul Ummah Pacet Angkatan 2017 Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 7(1), 11–23.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Miskan, M. (2018). Pemikiran Multikulturalisme KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *AL-FURQAN*, 6(2), 34–57.
- Muammar, K. (2020). Agama Dan Negara: Melangkahi Dua Pendekatan Yang Ekstrim. *Jurnal Peradaban Islam*, 23–56.
- Munawar, M. (2019). Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), 325–349.
- Nasution, R. H. (2019). Strategi Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pada Segmentasi Pemuda Di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM Fisip*, 6(1), 1–13.
- Noviyati, N., & Yasin, H. M. (2021). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 68–82.
- Nurdin, M. A., Saputra, A. T. D., & Prayitno, A. (2019). *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nursyamsiyah, S. (2018). Otoritas Kyai Pengasuh Di Pondok Pesantren Al-Fanani Universitas Muhammadiyah Jember. *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 1(2), 85–97.
- Pesak, J., Posumah, D., & Tulung, T. (2021). Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019. *JURNAL POLITICO*, 10(3).
- Putriwani, B. (2021). Strategi Politik Incumbent dan Faktor Penyebab Kekalahan Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Bangka. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(2), 117–122.
- Qodir, Z. (2011). *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z., Nurmandi, A., & Yamin, M. N. (2015). *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi, R., & Budianto, H. (2020). Political Branding Tagar# 2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(12), 1099–1112.
- Ruhany, T. (2019). Analisis Semiotika Charles S. Pierce terhadap Iklan Politik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. *LENTERA*, 3(1).
- Salamia, E. Z. (2019). *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Saleh, M., & Rosyidi, B. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus: Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 240–254.
- Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma'ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019. *LENTERA*, 3(1).
- Subhan, A. B. (2017). Peran Stasiun Televisi dalam Pengembangan Demokrasi, Ekonomi dan Politik di Indonesia. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 97–105.

- Sumartana, T. . (1999). Menakar Signifikansi Partai Politik Agama Dan Partai Pluralis Dalam Pemilu 1999 Di Indonesia. In A. Subhan (Ed.), *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supratman, L. P. (2018). *Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native*.
- Tarsidi, D. Z., Nugraha, I. S., Fadhilah, F., & Perttiwi, G. (2019). Orientasi “poligami”(politik generasi milenial) dalam menghadapi pesta demokrasi 2019. *Prosiding SEMINAR Nasional & Call Paper Psikologi Sosial*.
- Thalib, B. (2019). Menurunnya Suara Pemilih Terhadap Partai Islam. *Doctrinal*, 4(1), 988–998.
- Trisnani, E. E. (2021). Jejak Pesantren di Madura; Dari Islamisasi Hingga Dinamika Lembaga. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 52–69.
- Wahid, M. A. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1).
- Wicaksono, M. A., & Aziz, M. S. (2020). Selebritas dalam Pemilu 2019. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 1(1), 67–78.
- Yunus, N. R. (2018). Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019. *ADALAH*, 2(8).